

SMART VILLAGE MELALUI SISTEM GIGADES DI DESA KOTO BENAI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022-2023

Oleh: Aprinaldi

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293
Telp/Fax. 0761-63277

Abstrak

Gigades merupakan sistem pelayanan digital berupa aplikasi dan website yang di rancang sebagai media untuk dapat memudahkan pemerintah desa dalam penataan adminitrasi dan juga memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan adminitrasi melalui *smartphone*. Desa Koto Benai merupakan salah satu Desa yang menerapkan sistem gigades tersebut. Peneliti tertarik dengan bagaimana pelaksanaan sistem gigades di Desa Koto Benai tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara mendalam tentang pelayanan publik dalam pelaporan penataan adminitrasi desa yang saat ini dilaksanakan dan menjalankan sistem gigades di Desa Koto Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi. Peneltian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan adalah *smart village* dalam Herdiana (2019) yang memiliki tiga dimensi dalam pengembangan smart village yaitu *smart government*, *smart community*, *smart environment*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sistem gigades masih belum optimal. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya penggunaan sistem gigades tersebut. Ada beberapa faktor yang membuat pelaksanaan sistem gigades belum optimal yaitu (1) kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang dilakukan pemerintah Desa Koto Benai kepada masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang belum paham tentang cara penggunaan gigades. (2) kurangnya SDM yang mengelola sistem gigades di Desa Koto Benai. (3) banyak masyakarat belum mempunyai *smartphone* yang mendukung untuk menggunakan aplikasi gigades.

Kata Kunci: Pemerintahan Elektronik, Desa Pintar, Pelayanan Publik.

Abstract

Gigades is a digital service system in the form of an application and website designed as a medium to facilitate village governments in managing administration and also facilitate the public in obtaining administrative services via smartphones. Koto Benai Village is one of the villages that implements the gigades system. Researchers are interested in knowing how the gigades system is implemented in Koto Benai Village. This study aims to describe in depth public services in reporting village administration management which has currently been implemented with the implementation of the gigades system in Koto Benai Village, Benai District, Kuantan Singingi Regency. This study uses a descriptive qualitative research type. The theory used is smart village in Herdiana (2019) which has three dimensions in smart village development: smart government, smart community, smart environment. The results of this study indicate that the implementation of the gigades system is still not optimal. This is evident from the still low use of the gigades system. There are several factors that cause the implementation of the gigades system to be less than optimal, namely (1) the lack of socialization and training conducted by the Koto Benai Village government to the community so that many people still do not understand how to use gigades. (2) lack of human resources to manage the Gigades system in Koto Benai Village. (3) many people do not have smartphones that support the use of the Gigades application.

Keyword: E-Government, Smart Village, Public Service.

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi dan informasi saat ini telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat. Saat ini perkembangan teknologi telah menjadi tolak ukur kemajuan suatu negara. Pemerintah sebagai pelopor pembangunan negara dalam merespon revolusi industri 4.0 diharuskan untuk menerapkan teknologi informasi di setiap tata kelola pemerintahannya (Nur Saidah et al., 2022). Penggunaan teknologi dalam kegiatan pengelolaan masyarakat membantu mempermudah proses pertukaran informasi dan peningkatan layanan menjadi lebih efektif dan efisien (Kurnianingsih et al., 2020).

Dalam konteks pemerintah, pemanfaatan teknologi secara besar – besaran di mulai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang penerapan *e-government*. Sebagai yang telah dikemukakan oleh Saputro (2016), kualitas informasi, sistem, dan layanan berdampak positif terhadap kepuasan pengguna. Kepuasan pengguna dan hasil (tujuan organisasi) merupakan salah satu tujuan utama yang harus dicapai oleh pemerintah ketika melayani masyarakatnya. Pelaksanaan *e-government* dalam pemerintah desa dapat menjadi sarana penting dalam mendorong pembangunan desa (Ridhawati et al., 2019).

selanjutnya melalui kementerian desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa sistem informasi pembangunan desa dan pembangunan daerah akan menjadi salah satu prioritas pembangunan pedesaan. Berdasarkan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 86 tentang desa menjelaskan bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengembangkan sistem informasi desa dan sistem informasi desa dikelola oleh pemerintah desa serta dapat diakses oleh masyarakat desa dan semua pemangku kepentingan. Desa merupakan unit administratif terkecil dari sistem

pengelolaan pemerintahan desa dan perlu mengikuti perkembangan teknologi serta lebih meningkatkan kemampuannya dalam mengelola data pengelolaan kependudukan desa.

Munculnya era digital di Desa dapat mendorong berkembangnya paradigma baru dalam masyarakat desa. dahulunya, perdesaan selalu identik dengan gambaran ketertinggalan dan keterbelakangan. Namun melalui digitalisasi, desa dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia di desa agar dapat memanfaatkan teknologi dengan lebih efisien. Hal ini merupakan langkah strategis untuk membawa desa menuju modernisasi (Nur Saidah et al., 2022). Sejak meluasnya penggunaan teknologi informasi baik di pemerintahan maupun masyarakat, banyak desa yang telah mengalami transformasi struktural menjadi *smart village* dengan mengintegrasikan berbagai elemen-elemen pendukung pedesaan dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi informasi (Herdiana, 2019). Salah satu desa di Kabupaten Kuantan Singingi yang telah mengimplementasikan konsep *smart village* dalam tata Kelola pemerintahannya adalah Desa Koto Benai. Gigades merupakan system layanan desa berbasis digital yang diluncurkan oleh PT. Pheonix Kreatif Digital di kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 1 Maret 2021. Ada 6 fitur yang terdapat di dalam aplikasi Gigades yakni, (1) layanan surat, sebuah fitur yang memberikan layanan kepada masyarakat dalam pengurusan surat menyurat seperti kartu keluarga, KTP, surat keterangan usaha, dll. (2) pengumuman, fitur yang memberikan informasi penting yang di berikan pemerintah desa kepada masyarakat desa. (3) aspirasi, fitur ini bertujuan untuk sebagai wadah bagi masyarakat desa dalam menyampaikan aspirasi kepada pemerintah desa. (4) infografis desa, fitur ini memberikan data – data tentang monografis dan demografis desa. (5) produk desa/market place, fitur ini sebagai pasar digital yang membantu memasarkan peoduk

UMKM masyarakat desa. (6) dana desa, fitur ini berisi tentang rincian anggaran desa dalam pembangunan desa sehingga tercapainya transparansi dana desa.

pembangunan system Gigades ini bertujuan sebagai pembentukan jaringan dan transaksi layanan publik yang tidak terbatas sekat waktu dan lokasi. Kemudian meningkatkan layanan masyarakat terutama dalam hal mempercepat proses dan mempermudah akses interaksi masyarakat, meingkatkan transparansi pemerintahan dengan memperbanyak akses informasi publik, meningkatkan pertanggungjawaban pemerintah dengan menyediakan lebih banyak pelayanan dan informasi, serta menyediakan kanal akses kepada masyarakat, mengurangi waktu, uang dan sumber daya lain baik di sisi pemerintahan maupun pihak pihak yang terlibat dengan memperpendek pemberian layanan.

Tabel 1.1 Biaya instalasi dan biaya berlangganan

No.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH (Rp)
1.	Hosting	1 Ls	2.750.000,00	2.750.000,00
2.	Website Desa	1 Ls	5.500.000,00	5.500.000,00
3.	System admin web	1 Ls	8.000.000,00	8.000.000,00
4.	Aplikasi android	1 Ls	5.500.000,00	5.500.000,00
5.	Maintenan ce	3 bulan	300.000,00	900.000,00
Total.				22.650.000,00

Sumber: Laporan Realisasi APBDesa Pemerintah Desa Koto Benai, Tahun 2021

Berdasarkan uraian di atas pemerintah desa Koto Benai sudah melaksanakan peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi No 13 tahun 2020 pasal 6 ayat 2 (a) tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021 yaitu pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi

informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan desa.

Tabel 1. 2 Jumlah Akses Layanan Gigades

Jumlah Akses Layanan Gigades	
Tahun 2022	Tahun 2023
25	13

Sumber: *gigades.id*

Berdasarkan tabel di atas, dapat di lihat terjadinya penurunan jumlah pengakses layanan gigades. Pada tahun 2023 pemerintah desa melakukan upaya utntuk meningkatkan penggunaan layanan gigades oleh Masyarakat dengan memberikan pengumuman penerima bantuan langsung tunai (BLT) di website gigades, namun jumlah masyarakat yang mengakses gigades masih sedikit. Hal ini disebabkan karena banyak masyarakat yang belum paham dengan penggunaan layanan gigades. Selain itu masyarakat Desa Koto Benai mayoritas merupakan orang tua dan bekerja sebagai petani.

Penerapan sistem Gigades ini bertujuan untuk memberikan layanan publik yang lebih baik, dengan meningkatkan hubungan antara pemerintah desa dengan masyarakat melalui akses informasi dan meningkatkan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan desa. Kemudian dengan adanya fitur *market place* berharap dapat mendukung produk UMKM masyarakat desa. Peneliti memilih Desa Koto Benai sebagai objek penelitian karena Desa Koto Benai adalah salah satu desa yang tanggap dengan teknologi termasuk internet. Hal ini ditandai dengan sudah dijalankan pelayanan yang mekanismenya menggunakan sistem Gigades di pemerintahan Desa Koto Benai. Berdasarkan data data di atas, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana penerapan sistem Gigades dalam meningkatkan pelayan publik di Desa Koto Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Kuantan Singingi. Kemudian penulis mengidentifikasi beberapa

masalah yang dijadikan bahan penelitian sebagai berikut:

- a. Masyarakat belum semuanya menggunakan aplikasi Gigades karena masyarakat menganggap penggunaan aplikasi gigades cukup rumit sehingga masyarakat lebih memilih untuk datang langsung ke kantor desa untuk menerima layanan.
- b. Pemerintah desa Koto Benai kurang maksimal melakukan penyebaran informasi terhadap cara penggunaan aplikasi gigades.id untuk layanan surat secara online serta mempromosikan kemudahan dalam menggunakan aplikasi gigades.id. Kemudian kondisi jaringan tidak stabil dan lemah di desa Koto Benai.

Berdasarkan paparan yang penulis sampaikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Koto Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi yang berjudul “**SMART VILLAGE MELALUI SISTEM GIGADES DI DESA KOTO BENAI KECAMATAN BENAI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI TAHUN 2022-2023**”.

TEORI

Menurut Herdiana (2019) *smart village* memiliki tiga unsur penting yaitu *smart government*, *smart community*, dan *smart environment*. Adapun penjelasan dari tiga element tersebut adalah sbb:

a. *Smart Government*

Menurut Herdiana (2019) *smart government* adalah pemerintahan yang cerdas, terbuka, dan berpartisipasi dalam operasional pemerintahan dengan menerapkan *e-government* khususnya pemerintahan yang menggunakan teknologi komunikasi untuk mengelola pemerintahannya. Menurut Khushanandjani (2015) *Smart government* adalah pemerintahan menggunakan teknologi

informasi dan dilaksanakan sesuai dengan 4 fungsi pemerintah desa yaitu manajemen pemerintah, manajemen pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat (Maulana, S., *et al*, 2022). Penyelenggaraan kerja pemerintah tidak dapat terlepas dari faktor masyarakat yang menjadi landasan dalam orientasi kebijakan pemerintah desa (Herdiana, 2019). Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam konsep *smart village* dalam pemerintahan desa dapat memudahkan proses persiapan dan pelaksanaan pembangunan desa serta dapat meningkatkan pelayanan masyarakat, sehingga kinerja fungsi pemerintahan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan transparan (Herdiana, 2019).

b. *Smart community*

Smart community adalah masyarakat yang cerdas dalam arti mampu memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan desa. *Smart community* merupakan kontribusi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi komunikasi (Herdiana, 2019). Masyarakat merupakan karakter utama dalam perumusan kebijakan dan pembangunan desa, bukan sekedar sebagai tujuan dari pengelolaan pemerintahan dan pembangunan desa. Oleh karena itu, masyarakat pedesaan harus aktif dalam proses pembangunan desa agar dapat merasakan manfaat dari adanya suatu program pemerintah. Pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi harus dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai peluang untuk memaksimalkan peran dan kontribusinya terhadap pembangunan desa (Herdiana, 2019).

c. *Smart environment*

Kawasan pedesaan mempunyai karakteristik dan sifat tersendiri terkait dengan lingkungan pedesaan. Dalam konsep *smart village* suatu lingkungan tidak hanya mengacu pada lingkungan alam saja, melainkan mencakup seluruh unsur yang membentuk ciri suatu desa

yaitu tatanan sosial dan alam. Tatanan sosial di lingkungan pedesaan meliputi nilai - nilai adat dan budaya, sedangkan pada tatanan alam meliputi pengelolaan dan pemanfaatan alam secara lestari dan berkelanjutan (Herdiana, 2019). Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dapat memperkuat nilai - nilai adat dan budaya, misalnya dalam hal pengumpulan data, dokumentasi, serta mengidentifikasi potensi alam tanpa merusak tatanan alam (Herdiana, 2019).

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan - penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara kuantifikasi lainnya. Straus dan Corbin (2008) merinci bahwa penelitian kualitatif dapat digunakan untuk meneliti kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, gerakan sosial, atau hubungan kekerabatan (Eko Murdiyanto, 2020).

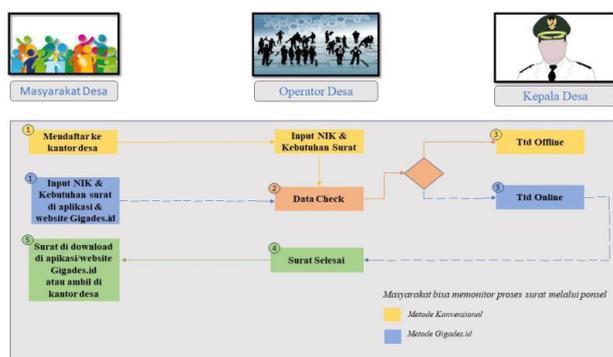
HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan *Smart village* Melalui Sistem Gigades.id Di Desa Koto Benai

1. *Smart Government*

Smart government yang dimaksud disini yaitu pemerintah yang cerdas, terbuka, dan partisipatif. Istilah lain yaitu *e-government* yang memiliki karakteristik pengelolaan berbasis teknologi.

Bagan 3. 1 Alur pengajuan pembuatan surat



Sumber: olahan penulis

Bagan diatas menggambarkan bagaimana proses alur pengajuan surat dengan menggunakan sistem gigades maupun secara konvensional. Untuk mengetahui lebih jelas terkait terkait *smart government* di Desa Koto Benai, berikut pernyataan hasil wawancara yang dilakukan kepada bapak Rasdianto selaku Kepala Desa Koto Benai, mengatkan bahwa :

“Dengan adanya system gigades.id tentunya agar dapatan membantu tingkat efisensi pada pelayanan desa semuanya bisa dilakukan dengan mudah hanya dengan menggunakan handphone dari mana saja sudah dapat menggunakannya tentunya hal ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan meningkatkan respon Digital di Desa Koto Benai . tidak hanya meningkatkan pelayanan adminitrasi desa saja, dengan adanya gigades ini kami juga bisa mempromosikan produk BUMDES kami melalui fitur marketplace yang tersedia di aplikasi gigades.” (6 Juli 2023)

Penulis juga melakukan wawancara dengan bapak Dedi Zulhendri selaku masyarakat Desa koto Benai yang mengatakan bahwa :

“Dengan online tentu jadi lebih mudah yah karena kita tidak harus jalan lagi ke Desa hanya dengan dari rumah buka handphone udah bisa akses. Saya juga pernah liat yah kalo di aplikasi itu udah ada anggaran desa setiap tahunnya jadi saya bisa tahu dana desa diginakan buat apa saja.” (22 mei 2024)

Berdasarkan wawancara dengan beberapa informan diatas bahwa sistem yang menggunakan *Digital* atau online tentu sangat membantu masyarakat karena tidak harus lagi datang hanya dari rumah masyarakat sudah bisa melakukannya. Masyarakat juga sudah merasakan bahwa pemerintah Desa Koto Benai sudah transparan terhadap anggaran dana desa sehingga tidak ada kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

2. Smart Community

Maksud *smart community* disini yaitu masyarakat yang cerdas. Masyarakat yang cerdas menjadi hal yang penting dalam pengembangan desa. Masyarakat harus dapat menggali potensi desanya, keterampilan sumber daya manusia, tingkat partisipasi yang tinggi dalam mendukung perkembangan desa.

Tabel 3. 1 Produk Jual Beli Online pada Fitur Marketplace Desa Koto Benai

No.	Nama Produk	Kategori
1.	Ikan Nila	BUMDes
2.	Keripik Singkong	Usaha Masyarakat
3.	Bawang Goreng	Usaha Masyarakat
4.	Sayur – Sayuran	Usaha Masyarakat

Sumber: *gigades.id*

Adanya fitur *marketplace* bertujuan untuk membantu memasarkan produk UMKM masyarakat. Berdasarkan data tabel diatas sudah masyarakat yang berhasil memasarkan produk usaha mereka sendiri. Dengan adanya *gigades.id* Pemerintah desa juga berharap dapat meningkatkan produk desa dan prekonomian masyarakat desa. Hal ini di jelaskan juga dalam oleh Kepala Desa dalam wawancara yang dilakukan bahwa :

“Didalam gigades.id ini sudah ada fitur market place jadi kami berharap masyarakat dapat memasarkan produk-produk yang dihasilkan oleh masyarakat desa sehingga bisa menjadi bagian dari promosi agar masyarakat diluar mampu melihat dan dikenal luas”. (21 mei 2024)

Namun masih banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya pemanfaatan teknologi. Lebih lanjut mengenai *smart community*, Staff Pelayanan Desa Koto Benai mengatakan :

“Untuk pelayanan melalui Digital di sini masih belum bisa berjalan dengan baik karena masyarakat yang mayoritas petani banyak yang tidak mengerti bahkan kadang ada yang belum menggunakan hp android paling hanya anaknya saja yang mengerti kami juga sebagai pegawai desa masih kurang mengerti disini yang paham

tentang Digital terutama di gigades hanya operator desanya saja.”(22 mei 2024)

Berdasarkan wawancara dapat kita ketahui banyak masyarakat yang belum mengerti tentang pelayanan *digital* hal ini sebabkan masyarakat Desa Koto Benai mayoritas berprofesi sebagai petani dan tidak mempunyai *smartphone* yang mendukung untuk menginstall aplikasi *gigades.id*

Berdasarkan wawancara di atas bahwa masih kurangnya SDM karena dari sebagian besar pegawai desa belum mengerti *smart Digital* dan masyarakat Desa Koto Benai masih Banyak yang memilih datang langsung ke kantor desa dalam pembuatan surat.

3. Smart Environment

Dalam konsep *smart village* suatu lingkungan tidak hanya mengacu pada lingkungan alam saja, melainkan mencakup seluruh unsur yang membentuk ciri suatu desa yaitu tatanan sosial dan alam. Tatanan sosial di lingkungan pedesaan meliputi nilai - nilai adat dan budaya, sedangkan pada tatanan alam meliputi pengelolaan dan pemanfaatan alam secara lestari dan berkelanjutan (Herdiana, 2019).

Gambar 3.1 Homestay Rumah Adat Desa Koto Benai



Sumber: *Gigades.id*

Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup dapat memperkuat nilai - nilai adat dan budaya,

misalnya dalam hal pengumpulan data, dokumentasi, serta mengidentifikasi potensi alam tanpa merusak tatanan alam (Herdiana, 2019).

Untuk mengetahui lebih jelas terkait *smart environment* di Desa Koto Benai, berikut wawancara yang dilakukan kepada Kepala Desa Koto Benai, mengatakan bahwa :

“Untuk ierkait lingkungan pada awalnya tujuan kami hanya mengfokuskan pada pelayanan adminitrasi desa namun dengan adanya layanan gigades juga berusaha mempromosikan objek wisata kami seperti homestay rumah adat yang ada di Desa Koto Benai ini” (21 mei 2024)

Selanjutnya, peneliti juga melakukan wawancara dengan ibu Preti Epira selaku *public relantionship* dari PT. Pheonix Kreatif Digital mengatakan:

“untuk terkait masalah pemanfaatan lingkungan harapan kami dapat membantu mempromosikan objek wisata desa Koto Benai walaupun tujuan awal kami membuat sistem gigades ini hanya untuk pelayanan adminitrasi desa”.(21 maret 2024)

berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui belum ada fitur dari sistem gigades.id terkait *smart environment* karena gigades.id hanya memfokuskan pada pelayanan adminitrasi desa.

Faktor Penghambat Pelaksanaan *Smart village* Di Desa Koto Benai

1. Sumber Daya Manusia yang Belum Memadai.

Dalam penggunaan sistem Digital ini memang mengalami beberapa kendala apalagi masa yang dilakukan adalah masa peralihan yang tadinya tidak menggunakan teknologi menjadi Digitalisasi memang sangat sulit. Hal ini di benarkan dalam wawancara dengan Kepala Desa bahwa :

“Kendalanya tentu ada yah yaitu dari SDM kita masih kurang banyaklah yang belum faham tentang teknologi dan pengoperasian komputer dan kurang jumlah staff desa juga menjadi kendala bagi kami .” (22 mei 2024).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui kurangnya staff ahli yang paham dalam pengoperasian komputer menjadi kedala bagi Pemerintah Desa Koto Benai.

Tabel 3. 2 Tingkat Pendidikan Pengurus Pemerintahan Desa Koto Benai

No.	Nama	Tempat tanggal lahir	Jabatan	Pendidikan
1.	RASDIANTO	Teluk Kuantan, 28 Oktober 1967	Kepala Desa	D3
2.	WALIYULAMRI	Benai, 20 Oktober 1976	Sekretaris Desa	S1
3.	DISMAN	Keresek, 25 April 1964	Kasi Kesejahteraan	SLTA
4.	DESFRIADI	Tebing Tinggi, 03 desember 1986	Kasi Pemerintahan	S1
5.	RISNO DOYO	Koto Benai, 01 januari 1990	Kasi Umum dan TU	S1
6.	FITRAYANSABADI	Koto Benai, 11 juni 1989	Kaur keuangan	SLTA
7.	MELDA	Koto Benai, 12 mei 1995	Staff Desa	SLTA
8.	SURIADI	Batu Rijal, 11	Kepala Dusun	SLTA

		desember 1978		
9.	MISRAWATI	Pangean, 01 agustus 1980	Kepala Dusun	PAKET C

Sumber: Data Pokok Pemerintahan Desa Koto Benai Tahun 2024

Kendala lain yang dialami dari sisi masyarakat yang belum paham atau awam dengan Digitalisasi apalagi masyarakat yang terbiasa dengan hal yang manual memang sangatlah sulit. Hal ini di benarkan oleh Sekertaris Desa bahwa :

“ Kalau kendala dari masyarakat sendiri ya masih banyak masyarakat yang ga mengerti karena sebagian besar sebagai petani orang-orang tua yang handphone saja walaupun punya belum android .” (21 mei 2024).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui banyak masyarakat yang belum mengerti tentang penggunaan teknologi hal ini dikarenakan sebagian besar masyarakat Desa Koto Benai berprofesi sebagai petani dan belum mempunyai *smartphone* yang mendukung penggunaan aplikasi gigades.id.

Tabel 3. 3 Data Pekerjaan Atau Mata Pencaharian Masyarakat Desa Koto Benai

Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Petani	57	39	96
Buruh Tani	3	5	8
Pegawai Negeri Sipil	3	2	5
Wiraswasta	35	15	50
Pelajar	30	34	64
Ibu rumah tangga	-	50	50
Buruh Harian Lepas	8	2	10
Karyawan Honorer	2	5	7
Belum Bekerja	75	58	133
Jumlah Total	213	210	423

Data Pokok Desa Koto Benai tahun 2024

Berdasarkan tabel tersebut kebanyakan masyarakat berprofesi sebagai petani dari 423 jumlah penduduk 96 orang berprofesi sebagai

petani, 50 orang ibu rumah tangga, 50 orang wiraswasta, 10 orang buruh harian lepas, 8 orang buruh tani, 7 orang karyawan honorer, dan 5 orang pegawai negeri sipil.

Tabel 3. 4 Komposisi Usia Penduduk Desa Koto Benai

Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Usia 0 – 6 tahun	25	21	46
Usia 7 – 12 tahun	27	19	46
Usia 13 – 18 tahun	28	19	47
Usia 19 – 25 tahun	17	35	52
Usia 26 – 40 tahun	56	49	105
Usia 41 – 55 tahun	43	40	83
Usia 56 – 65 tahun	11	15	26
Usia 66 – 75 tahun	4	14	18
Usia > 75 tahun	8	7	15
Jumlah Total	211	212	423

Data Pokok Desa Koto Benai tahun 2024

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat sebagian besar masyarakat Desa koto Benai berusia 26 – 40 tahun dengan jumlah 105 orang yang seharusnya bisa lebih aktif dalam penggunaan aplikasi gigades.id. Namun pada kenyataannya penggunaan aplikasi masih sangat rendah.

2. Kurangnya Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisasi tentang gigades.id sangat penting dilakukan karena tentunya masyarakat masih sangat awam tentang sistem digital. Terkait sosliasi penulis melakukan wawancara dengan kepala Desa Koto Benai yang mengatakan:

“untuk sosialisasi itu sudah pernah dilakukan oleh pihak gigades pada tahun pertama kami mulai mneggunakan pelayanan gigades. Pada saat itu pihak gigades sendiri melakukan sosialisasi dengan mendatangi langsung rumah masyarakat. Kemudian juga sudah pernah dilakukannya pelatihan oleh mahasiswa KKN pada tahun 2022 yang di bantu juga dengan pihak gigades sendiri. Namun, hanya beberapa masyarakat yang hadir” (22 mei 2024).

Berdasarkan wawancara tersebut dapat dilihat bahwa sudah pernah dilakukannya sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat Desa Koto Benai. Namun pelatihan yang dilakukan belum maksimal karena hanya ada beberapa masyarakat yang hadir dalam pelatihan tersebut

Gambar 3. 1
Sosialisasi Sistem
Gigades Kepada
Masyarakat Desa
Koto Benai tahun
2021



*Sumber: Instaram
gigades.id tahun 2021*

Gambar 3. 2
Pelatihan
Penggunaan Aplikasi
Gigades.id Kepada
Masyarakat Desa
Koto Benai tahun
2022



*Sumber: Dokumentasi
Proker KKN UMRI
Desa Koto Benai
Tahun 2022*

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui pemerintahan Desa Koto Benai masih kurang dalam melakukan sosialisasi pelatihan gigades.id kepada masyarakat. Hal ini yang menjadi salah satu faktor rendahnya penggunaan aplikasi gigades.id di Desa Koto Benai.

3. Tidak Adanya Pendampingan atau Pendekatan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi

Tidak adanya peran dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa ini maksudnya adalah melakukan pelatihan, sosialisasi, Padahal dapat diketahui bersama bahwa perhatian dari pemerintah tingkat kabupaten atau di atasnya sangat penting untuk kemajuan suatu daerah, namun hal tersebut

belum dapat terjadi. Terkait hal ini penulis melakukan wawancara dengan Bapak Repri Andika selaku pihak DINSOSPMD bidang pemerintah desa yang mengatakan:

“untuk sistem gigades ini kami tidak bisa campur dalam hal itu karena sistem gigades ini berasal dari sektor publik dan hal ini juga menyangkut dengan APBDes yang seharusnya dikelola oleh pemerintah desa sendiri. Memang pihak gigades sendiri pernah mendatangi DINSOSPMD tetapi hanya untuk perizinan sosialisasi ke desa”.(27 mei 2024)

Berdasarkan wawancara tersebut dapat diketahui bahwa DINSOSPMD tidak bisa ikut campur dalam pelaksanaan pelayanan desa melalui sistem gigades.id di Desa Koto Benai hal ini di karenakan sistem gigades.id berasal dari *public sector* bukan dari Pemerintah Daerah langsung.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang pelayanan desa melalui sistem gigades.id di Desa Koto Benai Kecamatan Benai Kabupaten Kuantan Singingi tahun 2022-2023, maka di tarik kesimpulan pelaksanaan pelayanan desa melalui sistem gigades.id di Desa Koto Benai belum berjalan dengan optimal. Walaupun pemerintah Desa Koto Benai sudah melaksanakan Perbup Kuantan Singingi No 33 Tahun 2020 tentang tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik. Namun Pemenrintah Desa Koto Benai belum berhasil mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab untuk pelayanan publik yang prima.

Faktor penghambat pelaksanaan pelayanan gigades.id disebabkan kurangnya staff desa yang paham tentang pengoperasian komputer. Kemudian budaya masyarakat yang sudah terbiasa datang langsung ke kantor desa dalam mengurus adminitrasi menjadi penyebab rendahnya penggunaan aplikasi gigades.id. Selain itu, jarak lokasi kantor yang tidak jauh

juga menjadi alasan masyarakat untuk datang langsung ke kantor desa. Kemudian banyak masyarakat yang belum mempunyai *smartphone* ataupun *provider* yang mendukung sehingga masyarakat sulit untuk mengakses sistem *gigades.id*. kemudian banyak masyarakat yang belum tahu tentang sistem *gigades.id* karena kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Koto Benai. Sejak awal penggunaan pelayanan *gigades.id* Pemerintah Desa Koto Benai baru melakukan sosialisasi sebanyak dua kali. Pendampingan dari pemerintah daerah menjadi faktor penting dalam mendukung pemerintah desa tentang pemanfaatan teknologi informasi di desa. Namun hingga saat ini belum ada koordinasi antara pemerintah Desa Koto Benai dengan pemerintah daerah terkait desa Digital.

SARAN

1. Penulis menyarankan kepada pemerintah Desa Koto Benai untuk memberikan pelatihan tentang teknologi informasi demi meningkatkan kualitas SDM pada pegawai kantor Desa Koto Benai agar semua pegawai mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat sehingga penggunaan sistem *gigades.id* bisa lebih optimal dan tidak hanya operator desa saja yang mengerti. Kemudian melakukan sosialisasi secara berkala kepada masyarakat agar masyarakat bisa tahu tentang sistem *gigades.id*
2. Penulis menyarankan kepada pihak sektor publik untuk menyediakan aplikasi atau website yang dapat di akses oleh beberapa stakeholder. Hal ini dikarenakan aplikasi atau website *gigades.id* hanya dapat di akses oleh desa – desa yang sudah bermitra dengan PT. Pheonix Kreatif Digital. Tentunya ini akan berpengaruh terhadap fitur *marketplace* dimana ruang lingkup dari target pasar akan sangat kecil.

3. Penulis menyarankan kepada pemerintah daerah untuk melakukan pendekatan tentang desa digital dan untuk memberikan perhatian terhadap desa – desa sudah mulai sadar akan pentingnya pemanfaatan teknologi.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, V. N. (2021). TA: Identifikasi Potensi Pengembangan Konsep *Smart Village* Pada Desa Wisata Rende Kabupaten Bandung Barat (Doctoral dissertation, Institut Teknologi Nasional Bandung).
- Arma, N. A. (2023). *The Collaborative Governance* Dalam Pengembangan *Smart Village* Desa Pangandaran. Publik: Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik, 10(2), 492-502.
- Baru, V. P., Djunaedi, A., & Herwangi, Y. (2019). Tahap Pengembangan Smart Kampung di Desa Ketapang Kabupaten Banyuwangi. *Jurnal Planoeearth*, 4(2), 68-80.
- Eniyati, S., Santi, R. C. N., Retnowati, R., Mulyani, S., & Martha, K. (2017). Perhitungan tingkat kesiapan implementasi smart city dalam perspektif smart governance dengan metode fis mamdani. *Dinamik*, 22(1), 39-48..
- Herdiana, D. (2019). Pengembangan konsep *smart village* bagi desa-desa di Indonesia (Developing the *smart village* concept for Indonesian villages). *JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi)*, 21(1), 1-16.
- Irawan, B. (2015). *E-government* Sebagai Bentuk Baru Dalam Pelayanan Publik: Sebuah Tinjauan Teoritik. *Jurnal paradigma*, 4(3), 200-209.
- Kurnianingsih, I., Yugaswara, H., Suhaeri, S., Wardiyono, W., & Rosini, R. (2020).

PKM *Smart village* Melalui Pengelolaan Perpustakaan Desa Rintisan Berbasis Teknologi Informasi di Desa Bantarsari Bogor. *Jurnal Abdinus: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 4(1), 63–74.

Maulana, S., Kagungan, D., & Prihantika, I. (2022). Sinergitas Pelaksanaan Program *Smart village* di Desa Hanura Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. *Jurnal Administrativa*, 4(1), 101-113.

Rachmawati, R. (2018). Pengembangan *Smart village* untuk Penguat Smart City dan Smart Regency, 14.

Ridhawati, E., Fitriani, Y., Sari, D. N., P. P., & Pratama, R. (2019). Penerapan *E-government* pada Pekon Sukamulya (Studi kasus: Pekon Sukamulya Pringsewu. *Jurnal Cendikia*, 17, 246–250.

Saidah, N., Khasanah, L., & Ridloah, S. (2022). Analisis Strategi Kesuksesan Kampung Digital Krandegan dalam Mendukung Program *Smart village*. *Journal of Regional and Rural Development Planning (Jurnal Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Perdesaan)*, 6(2), 123-135.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 86.

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 7 ayat 3.

Permendes (PDTT) No 13 tahun 2020 pasal 6 ayat 2 (a) tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2021.

Perbup No 33 Tahun 2020 tentang tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik.